

LAPORAN

**MONITORING HASIL
PENGUKURAN KINERJA**

**PROGRAM DAN KEGIATAN,
REALISASI ANGGARAN,
DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**TAHUN ANGGARAN 2024
TRIWULAN III**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Laporan Hasil Evaluasi Internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Kepulauan Selayar Triwulan III Tahun 2024 terdiri atas evaluasi Program/kegiatan, realisasi anggaran, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan pemantauan rencana aksi merupakan sarana penyajian data dan informasi Inspektorat sebagai Instansi Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Hasil evaluasi internal Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar penyajiannya diupayakan sebaik mungkin dan bertujuan memudahkan para stakeholder dalam mengevaluasi. Kami mengucapkan terima kasih kepada pegawai Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah berpartisipasi dalam penyusunan laporan hasil evaluasi Internal ini dan kami menyadari dengan segala kekurangan, bahwa laporan evaluasi ini masih belum sempurna. Oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati kami mengharapkan saran yang membangun agar lebih baik dimasa yang akan datang.

Benteng, September 2024

Kepala Dinas PMPTSP,

Drs. H. ANDI NUR HALIQ, M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19660507 198603 1 022

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| Kata Pengantar | ii |
| Daftar Isi | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Tujuan | 1 |
| C. Gambaran Umum Dinas PMPTSP | 1 |
| BAB II EVALUASI | |
| A. Evaluasi atas capaian program dan Kegiatan | 7 |
| B. Evaluasi atas Capaian Realisasi Anggaran | 10 |
| C. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) | 13 |
| BAB III PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI | |
| A. Permasalahan | 15 |
| B. Rekomendasi | 15 |
| BAB III PENUTUP | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PAN Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja serta Permen PAN Nomor: 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015.

Akuntabilitas Kinerja adalah sebagai Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk **mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan** pelaksanaan **program dan kegiatan** yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara **terukur** dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara **periodik**.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Evaluasi Program Dinas dan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Tahun 2024 adalah:

1. Sebagai wujud pertanggungjawaban pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program/kegiatan ;
2. Untuk mengetahui keberhasilan serta kegagalan pada pencapaian program dan kegiatan pada Triwulan III Tahun 2024;
3. Sebagai tolok ukur perbaikan untuk capaian program/kegiatan triwulan kedepannya.

C. Gambaran Umum Dinas PMPTSP

Dinas PMPTSP sebagai instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki gambaran berikut:

1. Peringkat : B

2. Alamat : Jalan Jend. Achmad Yani Mal Pelayanan Publik (MPP) Benteng Kab. Kepulauan Selayar
3. Email : dpmptsptk.selayar@gmail.com
4. Titik koordinat : **S** 6,117966, **E** 120,467171
5. Foto kantor

Gambar 1.1



1. Struktur Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi

Kepala Dinas PMPTSP mempunyai Tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Struktur kelembagaan Dinas PMPTSP yang menjadi tanggung jawabnya sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis, operasional di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai kebijaksanaan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyiapan pelaksanaan kegiatan Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
- c. Pemberian perizinan dan pelayanan umum dibidang tugasnya;
- d. Pelaksanaan pelayanan administrasi Dinas;

- e. Pelaksanaan tugas-tugas pembantuan dari pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Tugas Kepala Dinas PMPTSP dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah, meliputi:

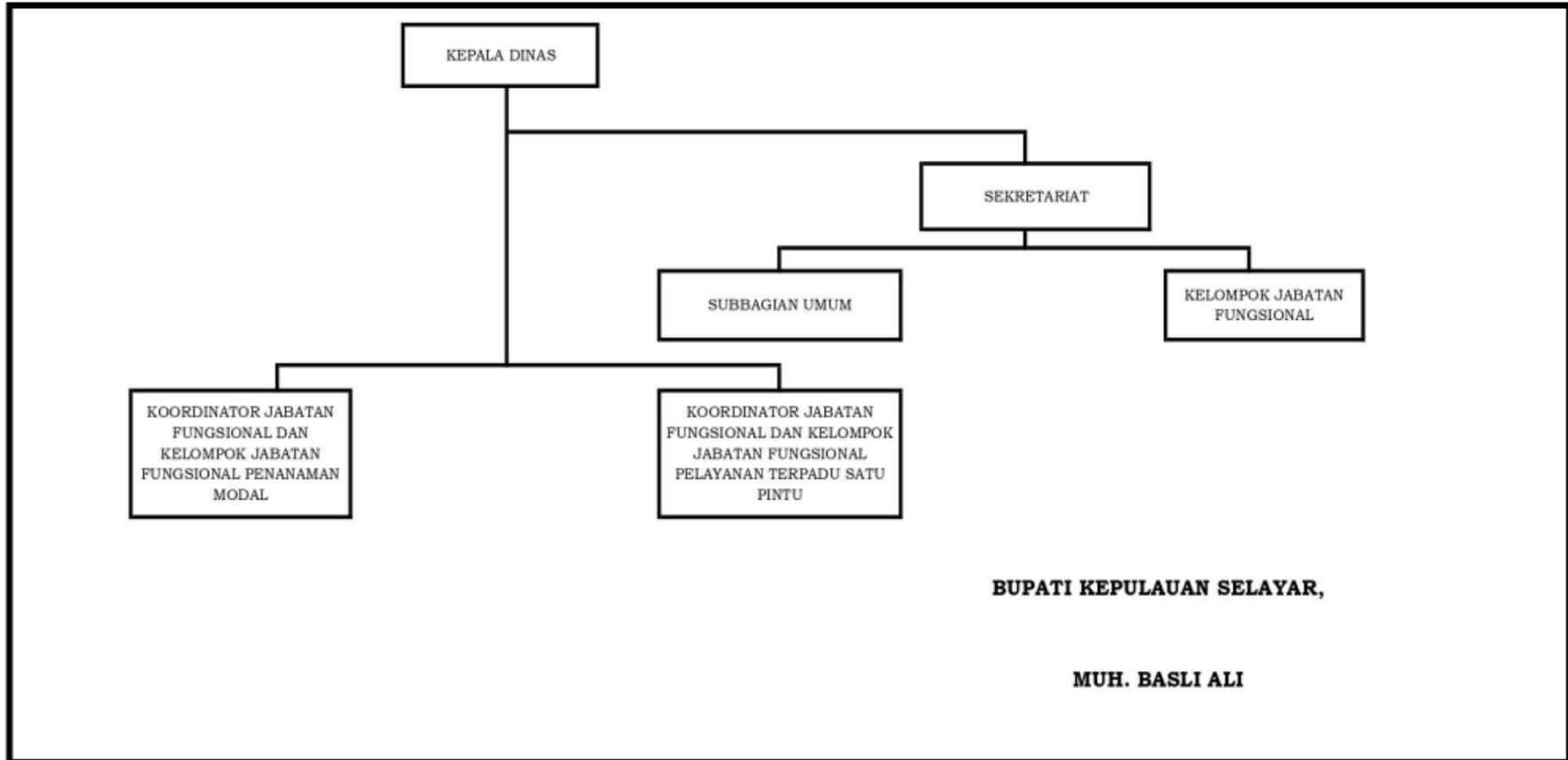
- a. Menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis penanaman modal;
- g. Menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- h. Menyelenggarakan menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
- i. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- j. Menyelenggarakan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- k. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- l. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
- m. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Dinas dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- o. Menyelenggarakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Struktur Organisasi berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris terdiri dari;
 - Subbagian Umum
3. Bidang Penanaman Modal;
4. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional;

Gambar 1.2
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



Dinas PMPTSP merupakan salah satu perangkat daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar yang memiliki variasi SDM mulai dari Kepala Dinas sampai dengan staf, merupakan kesatuan dalam mewujudkan visi, misi, program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang telah direncanakan.

2. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Perangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural

Keadaan Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan jabatan Tahun 2023 sebagai berikut :

- JPTP = 0 orang
- Administrator (Kelas 12) = 1 orang
- Administrator (Kelas 11) = 3 orang
- Pengawas = 3 orang
- Pelaksana = 15 orang
- Fungsional = 6 orang
- Jumlah = 26 orang**

Untuk mengetahui sumberdaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar, berikut disajikan tabel 1 :

Tabel 1.1

Susunan Kepegawaian Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Komposisi Golongan dan Eselon Per 31 Maret 2024

| No | Tingkat pendidikan | Golongan | | | Jumlah | Eselon | | | | Jumlah | Pegawai Kontrak | Pegawai Sukarela |
|--------|--------------------|----------|-----|----|--------|--------|-----|----|------|--------|-----------------|------------------|
| | | IV | III | II | | II | III | IV | Staf | | | |
| 1 | Strata Dua (S2) | 2 | 2 | - | 4 | 1 | 2 | - | 2 | 5 | - | - |
| 2 | Strata Satu (S1) | 2 | 11 | - | 13 | - | 1 | 1 | 11 | 13 | 16 | - |
| 3 | Diploma | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 4 | SLTA | 1 | 3 | 4 | 8 | - | - | - | 7 | 7 | 6 | - |
| Jumlah | | 5 | 17 | 4 | 26 | 1 | 3 | 1 | 21 | 26 | 22 | - |

Sumber data : Subag. Umum Dinas PMPTSP Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2024

Berdasarkan alokasi jumlah pegawai yang tersedia sebagaimana dalam tabel 1.1 tersebut maka dapat dikatakan bahwa jumlah pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dikatakan sudah presentatif hanya saja jika dilihat dari segi

pendidikannya Sebagian belum sesuai kualifikasi dengan jabatannya.

BAB II EVALUASI

A. Evaluasi atas Capaian Program dan Kegiatan

Evaluasi atas capaian program dan kegiatan pada triwulan III tahun 2024 sebagai berikut :

| No. | Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|-----|--|--|----------------|-----------|-------------|
| 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Kinerja (%) | 70,28% | - | - |
| | | Persentase Capaian Kinerja Keuangan (%) | 85,00% | | |
| | a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | 14,06% | 14,06% |
| | 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dok | 2 dok | 100 % |
| | 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dok | 1 Dok | 100 % |
| | 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA perubahan SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dok | - | - |
| | 4) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dok | 1 Dok | 100 % |
| | 5) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA perubahan SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dok | - | - |
| | 6) Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 laporan | - | - |
| | 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 laporan | - | - |
| | b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah laporan keuangan yang akuntabel yang disusun | 100 % | 32% | 32% |
| | 1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 26 orang/bulan | 156 orang | 600% |
| | 2) Koordinasi dan Penyusunan | Jumlah Laporan Keuangan Akhir | 1 Dok | - | - |

| No. | Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|-----|--|--|-------------|-----------|-------------|
| 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| | 3) Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/ semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | 1 dok | 1 dok | 100% |
| | 4) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 15 dok | 3 laporan | 25 % |
| | c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah | 100% | - | - |
| | 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 3 Dok | 1 dok | 50% |
| | 2) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 8 Dok | 4 Dok | 50 % |
| | 3) Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 3 Dok | 2 dok | 66,67% |
| | d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah | 100% | - | - |
| | 1) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 2 paket | 2 paket | 100 % |
| | 2) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | 3 Jenis | 100 % |
| | 3) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 laporan | 80 kali | 80 % |
| | e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemenuhan sarana prasarana perkantoran yang tersedia | 100% | 71% | 71% |
| | 1) Pengadaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | - | - | - |
| | 2) Pengadaan mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | - | - | - |
| | 3) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 4 Unit | 1 unit | 25% |
| | f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran | 100% | 21,78% | 21,78% |
| | 1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 laporan | 3 laporan | 100 % |
| | 2) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Jumlah Layanan umum Kantor yang tersedia | 3 laporan | 3 laporan | 100 % |
| | g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah barang milik daerah yang dipelihara | 100% | - | - |
| | 1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 2 unit | 1 Unit | 50% |

| No. | Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|-----|---|--|--------------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 2) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 5 unit | 2 unit | 25% |
| | 3) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 jenis | - | - |
| | 4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 20 jenis | 5 jenis | 25% |
| 2 | Program Promosi Penanaman Modal | Jumlah Investor PMDN/PMA | 32 Investor | - | - |
| | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah kegiatan Penerimaan Misi penanaman modal | 2 kegiatan | kegiatan | 60,67% |
| | 1) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota | 1 Dok | - | - |
| | | Kegiatan pameran penanaman modal | | - | - |
| 3 | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) (Rp. Juta Rupiah) | 67.000 | - | - |
| | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Nilai Realisasi Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Rp. Juta Rupiah) | 67.000 | - | - |
| | 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | 204 pelaku usaha | 64 pelaku ussha | 31,4% |
| | 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan | 13 kegiatan usaha | 25 kegiatan usaha | 41,67% |
| 4 | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Persentase Potensi untuk peluang Investasi daerah (%) | 60% | - | - |
| | Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/ kota | Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah | 15 perusahaan | - | - |
| | 1) Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah | 2 dokumen | - | - |
| | 2) Evaluasi Pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif yang tersedia | - | - | |
| 5 | Program Pelayanan Penanaman Modal | Persentase Izin yang diterbitkan (%) | 100% | 75,46% | 75,46% |
| | Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Penerbitan izin perizinan dan non perizinan | 1400 izin | 75,46% | 75,46% |
| | 1) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 1400 izin (Pelaku Usaha) | 981 | 75,46% |
| | 2) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha | 13 Kegiatan Usaha) | - | - |

| No. | Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|-----|--|---|----------------|---------------|-------------|
| 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | dan Non Perizinan | | | |
| | 3) Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan | Jumlah orang yang Memperoleh LayananKonsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan TerpaduPerizinan dan Non Perizinan | 4 pelaku usaha | 1 pelaku usah | 8,33% |
| | 4) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | - | - | - |
| 6 | Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Persentase pemenuhan permintaan data dan informasi yang diterima secara online dan terintegrasi (%) | 100% | 300% | 300 % |
| | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pemenuhan permintaan data dan informasi yang diterima | 100% | 300% | 300 % |
| | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan NonPerizinan Berbasis Sistem Pelayanan PerizinanBerusaha Terintegrasi Secara Elektronik yangDiolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | 12 dokumen | 6 dokumen | 50 % |

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa capaian program dan kegiatan triwulan III tahun 2024 mencapai 50,80%. atau rata-rata **rendah** karena masih terdapat beberapa program/kegiatan yang belum terlaksana.

B. Evaluasi atas Capaian Realisasi Anggaran

Evaluasi atas capaian realisasi anggaran pada triwulan III tahun 2024 sesuai tabel sebagai berikut :

| No. | Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Target (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Persentase (%) |
|-----|--|---------------|-----------------|----------------|
| 1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 3.392.851.000 | 2.244.263.885 | |
| | a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| | 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3.000.000 | 2.481.500 | - |
| | 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD | 3.500.000 | 2.381.400 | 68% |
| | 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 3.500.000 | 938.000 | 26.80% |
| | 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD | 3.500.000 | 3.250.000 | 93,29% |
| | 5) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 3.500.000 | - | - |

| No. | Urusan Pemerintahan | Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Target (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Persentase (%) |
|-----|---------------------|--|---------------|-----------------|----------------|
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.000.000 | - | - |
| | | 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2.000.000 | 1.367.400 | 68,37% |
| | | b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| | | 1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | 2.504.831.000 | 1.790.618.939 | 71,49% |
| | | 2) Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3.000.000 | - | - |
| | | 3) Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/ semesteran SKPD | 3.000.000 | 2.802.400 | 93,41% |
| | | 4) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 4.000.000 | 3.264.600 | 81,62% |
| | | c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | | | |
| | | 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | 3.000.000 | 2.430.500 | 81,02% |
| | | 2) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 3.000.000 | 2.840.500 | 94,76% |
| | | 3) Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD | 4.000.000 | - | - |
| | | d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| | | 1) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 8.517.600 | 125.000 | 1,47% |
| | | 2) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 4.020.000 | 2.275.000 | 56,59% |
| | | 3) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 234.768.000 | 159.780.595 | 68,06% |
| | | e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 131.360.000 | - | - |
| | | 1) Pengadaan Aset Tak Berwujud | - | - | - |
| | | 2) Pengadaan mebel | - | - | - |
| | | 3) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | 131.360.000 | - | - |
| | | f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| | | 1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 141.748.800 | 92.236.161 | 65,35% |
| | | 2) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | 216.540.400 | 148.010.200 | 68,35% |
| | | g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| | | 1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | 45.716.000 | 21.180.690 | 46,33 |
| | | 2) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | 46.790.000 | 4.525.000 | 9,67% |
| | | 3) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | - | - | - |
| | | 4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1.560.000 | 3.738.000 | 21,29% |

| No. | Urusan Pemerintahan | Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Target (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Persentase (%) |
|-----|------------------------|--|--------------|-----------------|----------------|
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2. | Urusan Penanaman Modal | 3. Program Promosi Penanaman Modal | 70.000.000 | 35.789.100 | 51,13% |
| | | Kegiatan Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota | 70.000.000 | 35.789.100 | 51,13% |
| | | 2) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | 70.000.000 | 35.789.100 | 51,13% |
| | | 4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | | | |
| | | Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | | | |
| | | 1) Bibing teknis pelaku usaha | 385.466.000 | 166.897.400 | 43,30 |
| | | 2) Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | 188.434.000 | - | - |
| | | 3) Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | 94.217.000 | 790.000 | 0,84% |
| | | 5. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | 10.000.000 | 4.604.200 | 46,04% |
| | | Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/ kota | 10.000.000 | 4.604.200 | 46,04% |
| | | 1) penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | 10.000.000 | 4.604.200 | 46,04% |
| | | 6. Program Pelayanan Penanaman Modal | 79.980.000 | 40.288.569 | |
| | | Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 79.980.000 | 40.288.569 | |
| | | 1) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 39.000.000 | 30.538.569 | 78,30% |
| | | 2) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal | 1.800.000 | 450.000 | 25,00% |
| | | 3) Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan | 19.380.000 | - | - |
| | | 4) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | - | - | - |
| | | 7. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | 19.800.000 | 9.300.0000 | 46,97% |
| | | Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 19.800.000 | 9.300.0000 | 46,97% |
| | | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 19.800.000 | 9.300.0000 | 46,97% |

Realisasi anggaran Triwulan III sebesar Rp. 2.492.633.154,- dari Jumlah anggaran Tahun 2024 senilai Rp. 4.295.948.000,- sehingga

Persentase rata-rata capaian realisasi Anggaran untuk Triwulan III tahun 2024 sebesar 58,02%.

C. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Evaluasi atas capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) triwulan III tahun 2024 Sesuai tabel sebagai berikut :

| NO. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | TARGET 2024 | Realisasi | Persentase Capaian 2024 |
|-----|---|---|---|--|-----------|-------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | | | |
| 1 | Mewujudkan reformasi birokrasi Perangkat Daerah | Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah | Indeks Reformasi Birokrasi Dinas PMPTSP | 65,00 (B) | | |
| | | | Nilai SAKIP Dinas PMPTSP | 65 (B) | | |
| | | | Laporan Keuangan Dinas PMPTSP sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) | Sesuai | | |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas PMPTSP | 72,50% | | |
| 2 | Meningkatkan Investasi | Meningkatnya kerjasama investasi | Persentase Peningkatan Nilai Investasi | 1,50 % | | |
| | | | Persentase peningkatan investor berskala nasional (PMDN/PMA) | 6,00% | | |
| | | | Persentase peningkatan nilai investasi PMDN berskala nasional | 10,00% | | |
| | | | Persentase peningkatan nilai investasi PMA | 4,00% | | |
| | | | Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif | Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik | 84,00% | |

BAB III

PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

A. PERMASALAHAN

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman dan Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) dari bulan Januari sampai dengan September 2024, permasalahan yang terjadi adalah Serapan anggaran Dinas PMPTSP masih terbilang rendah tetapi terdapat peningkatan dari Triwulan II yaitu 34,35% ke 58,02% karena masih ada beberapa kegiatan pengadaan yang belum terealisasi yang disebabkan oleh mekanisme penggunaan aplikasi perencanaan SIPD belum sepenuhnya dipahami oleh PPTK.

B. REKOMENDASI

Rekomendasi tindaklanjut untuk menghadapi masalah di atas adalah :

1. Perlunya peningkatan kompetensi PPTK terkait penerapan aplikasi SIPD sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan tidak salah rekening yang menyebabkan kendala pelaksanaan kegiatan.
2. Perlu adanya kepastian anggaran taktis bagi pemerintah daerah di awal tahun sehingga tidak terjadi refocusing anggaran pada pertengahan tahun.

BAB IV
P E N U T U P

Demikian laporan hasil evaluasi program/kegiatan/subkegiatan, realisasi anggaran, capaian kinerja utama dan pemantauan rencana aksi disusun untuk memperoleh umpan balik terkait pencapaian target sehingga diketahui permasalahan dan rekomendasi untuk bahan perbaikan dan tindak lanjut pada triwulan berikutnya, terima kasih.

Benteng, September 2024
Kepala Dinas PMPTSP,

Drs. H. ANDI NUR HALIQ, M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19660507 198603 1 022